



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa guna hal dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Magetan Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 – 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Magetan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

Pasal 2

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Pasal 4

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 APRIL 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

VISI : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera

- MISI :
1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART;
 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah.
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 4. Memantapkan ketercakupn kuantitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;
 5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

KINERJA		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Nilai Indeks Kesehatan	BPS	DINKES
2.	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Nilai Indeks Pendidikan	BPS	DINDIK
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	BPS	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	DISNAKER
4.	Terwujudnya Masyarakat yang rukun, tertib, dan agamis	Indeks Toleransi	Nilai Indeks Toleransi	BPS	

5.	Meningkatnya Kemampuan/Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Omzet Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Nilai Omzet Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	DINKOP & UM	DINKOP & UM
6.	Meningkatnya Kegiatan Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi	DPMPTSP	DPMPTSP
		Jumlah Investor	Jumlah Investor	DPMPTSP	DPMPTSP
7.	Meningkatnya Kegiatan Industri Pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Nilai PDRB Sektor Pariwisata	BPS	Disparbud.
8.	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	BPS	Disperindag
9.	Meningkatnya Kegiatan Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	BPS	DTPHPKP
10.	Meningkatnya Status Kemandirian Desa	Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju yang Meningkatkan Menjadi Desa Mandiri	Dinas PMD	Dinas PMD
		Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	Jumlah Desa Berkembang Menjadi Desa Maju	Dinas PMD	Dinas PMD
11.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		DLH	DLH
		<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU) - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH) 			
12.	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	Jumlah Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya	BPBD	BPBD

13.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Yang Merata Untuk Semua Wilayah	Indeks Konektifitas	<u>Panjang Jalan kondisi baik</u> Jumlah Kecamatan Yang Dihubungkan	DPUPR	DPUPR
14.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Lahan Yang Terlayani Irigasi	<u>Total Luas Lahan terlayani irigasi X 100%</u> Luas daerah Irigasi Kabupaten	DPUPR	DPUPR
15.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien	Opini BPK	Opini BPK	Inspektorat	Inspektorat
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	DISKOMINFO	DISKOMINFO
		Hasil Evaluasi AKIP	Nilai SAKIP	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor IKM	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 20 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 APRIL 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Instansi: Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Tugas : Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM	3	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100$	100%	Inspektorat Kab. Magetan / Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan

3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini	WTP	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	A	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan
	c. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL sesuai rekomendasi}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah TL sesuai rekomendasi}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$	100% 90%	Inspektorat Kab. Magetan/ Sekretariat	Inspektorat Kab. Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit kerja : SEKRETARIAT DPRD
 TUGAS : Memfasilitasi Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 FUNGSI : 1. Perencanaan program Sekretariat DPRD
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD
 3. Penyelenggaraan urusan umum, persidangan, perundang-undangan dan keuangan DPRD
 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam tugas Sekretariat DPRD
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Pimpinan DPRD sesuai bidang tugasnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Fasilitas Kegiatan DPRD	<p>Persentase Perda yang diselesaikan pembahasannya</p> <p>Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan</p> <p>Tersusun dan terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam Dokumen Perencana Lima Tahun (RPJM) maupun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKPD)</p> <p>Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, penentuan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah Raperda yang dibahas}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Rencana Tahunan pada alat kelengkapan yang ada}}{\text{Jumlah alat kelengkapan yang ada}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang ada}}{\text{Jumlah Dokumen yang tersusun dan terintegrasi dalam program kerja DPRD}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang ada}}{\text{Jumlah program DPRD yang masuk dalam dokumen anggaran sekwan}} \times 100\%$</p>	<p>Bagian Perundang undangan dan humas (90%)</p> <p>Bagian Rapat dan Risalah (80%)</p> <p>Bagian Keuangan(80%)</p> <p>Bagian Keuangan (80%)</p>	<p>Sekwan</p> <p>Sekwan</p> <p>Sekwan</p> <p>Sekwan</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MAGETAN**

- Visi : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- Misi : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah serta tugas lain diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
- a Penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah ;
 - b Penyusunan rancangan APBD dan rancangan PAPBD ;
 - c. Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD
 - d Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD);
 - e. Pelaksanaan pengendalian APBD;
 - f. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - g. Pelaksanaan penetapan surat Penyediaan Dana (SPD).
 - h Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
 - i. Pelaksanan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
 - j. Penyajian informasi PAD dan keuangan daerah ;
 - k Pelaksanaan penetapan pajak daerah;
 - l Menyiapkan pelaksanaan pendataan, perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan asli daerah
 - m Pelaksanaan penghitungan, penetapan, pendistribusian, verifikasi, penagihan dan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak (DHKP)
 - n Pelaksanaan Optimalisasi manajemen aset daerah;
 - o Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - p Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - q Perumusan dan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ;
 - r. Penatausahaan atas piutang daerah atau tagihan daerah ;
 - s. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;
 - t Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang penyusunan anggaran dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai SAP}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	
		Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah bidang aset tanah yang sudah bersertifikat}}{\text{Jumlah bidang aset tanah keseluruhan}} \times 100\%$	Laporan hasil persertifikatan tanah Kabupaten Magetan / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	
		Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Laporan Penerimaan PAD / BPPKAD KABUPATEN MAGETAN	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA LITBANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya capaian kinerja Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah indikator kinerja daerah dalam RPJMD yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator kinerja daerah dalam RPJMD}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah seluruh hasil kelitbangan}} \times 100\%$

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya produktifitas kinerja ASN	Prosentase ASN yang SKPnya bernilai baik	$\frac{\text{Jumlah ASN yang SKPnya bernilai baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$	
2	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	Prosentasr ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pejabat} \frac{\text{struktural}}{\text{fungsional}} \text{ yang memenuhi persyaratan kompetensi}}{\text{Jumlah Seluruh pejabat struktural fungsional}} \times 100$	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- INSTANSI** : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan
- VISI** : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI** : Meningkatkan Percepatan dan Perluasan dan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang SMART
- TUGAS** : Membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- FUNGSI** :
1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 2. Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembangunan Sistem Politik Dalam Negeri;
 3. Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan dalam rangka Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta Kewaspadaan Nasional;
 4. Pelaksanaan Kajian Strategis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bidang Politik Dalam Negeri;
 5. Pelaksanaan Koordinasi bersama lembaga /Instansi terkait dalam kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 6. Pelaksanaan Evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik sosial	Persentase Potensi Konflik yang berhasil dicegah	$\frac{\text{Jumlah Potensi Konflik Yang berhasil dicegah}}{\text{Jumlah Potensi Konflik Sosial}} \times 100$	Bidang Kewaspadaan Nasional	Bakesbangpol

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGETAN
2. Visi : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
3. Misi : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
2. Tujuan : Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Tugas :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya tingkat responsifitas dalam penanganan bencana	1. Persentase kejadian bencana yang tertangani dengan cepat dan akurat	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh kejadian bencana}} \times 100 \%$ <p>* Kejadian Bencana merupakan peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ ataupun kerusakan</p>	BPBD Kabupaten Magetan Daftar/ Laporan Kejadian Bencana (Register Bencana)	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi Kedaruratan dan Logistik
2. Meningkatnya pemulihan pasca bencana	1. Persentase pemulihan pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah daerah terdampak yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh daerah terdampak}} \times 100 \%$ <p>* Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu-Pasna) merupakan suatu rangkaian pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p>	BPBD Kabupaten Magetan (Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana)	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. MAGETAN**

- VISI : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)
- TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK / RA}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	Bidang PAUD dan PNF
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI / Paket A	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD / MI / Paket A}}{\text{Jumlah Anak Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP / MTs / Paket B	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP / MTs / Paket B}}{\text{Jumlah Anak Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD / MI / Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTs / Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP / MTs / Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
		Angka partisipasi sekolah SD / MI	Jumlah Partisipasi siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD / MI / Paket A	Bidang DIKDAS
		Angka partisipasi sekolah SMP / MTs	Jumlah Partisipasi siswa usia 7-12 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	Bidang DIKDAS

	Angka Putus Sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat \& jenjang SD / MI}}{\text{Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD / MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada tingkat \& jenjang SMP / MTs}}{100\%}$ Jumlah siswa pada tingkat yg sama dan jenjang SMP / MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang DIKDAS
	Angka Kelulusan (AL) SD / MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD / MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD / MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP / MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP / MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD / MI ke SMP / MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP / MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD / MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Bangunan sekolah SD / MI kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas SD / MI Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Ruang Kelas SD / MI}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Bangunan sekolah SMP / MTs kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Ruang Kelas SMP / MTs Kondisi Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Ruang Kelas SMP / MTs}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1 / D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD / MI dan SMP / MTs}} \times 100\%$	Bidang PTK
	Prosentase SD / MI berakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah SD / MI berakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh SD / MI}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Prosentase SMP / MTs berakreditasi A	$\frac{\text{Jumlah SMP / MTs berakreditasi A}}{\text{Jumlah seluruh SMP / MTs}} \times 100\%$	Bidang DIKDAS
	Angka rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah di jalani	Bidang DIKDAS
	Angka harapan lama sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Bidang DIKDAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan
 Visi : Masyarakat Magetan yang Smart semakin mantab dan lebih sejahtera
 Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan
 c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan
 d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan.
 e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Angka kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan tahun	Bidang Pariwisata	Disparbud
		Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata tahun	Bidang Parwisata	Disparbud
2.	Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	Bidang Kebudayaan	Disparbud
		Persentase Seni Budaya Lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah Seni Budaya Lokal di Kabupaten Magetan}} \times 100 \%$	Bidang Kebudayaan	Disparbud

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

- VISI** : Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI KE – I** : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil).
- TUGAS** : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
I.	Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1. Persentase Keluarga Sehat	Jumlah keluarga yang melaksanakan lebih dari 80% dari 12 indikator keluarga sehat -----x100% Jumlah seluruh indikator keluarga sehat	Dinas Kesehatan
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah rata-rata hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

VISI : Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera

MISI : Misi 1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan

Misi 4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI: 1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

4. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya cakupan layanan air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih yang layak	$\frac{\Sigma \text{Rumah tangga pengguna air bersih}}{\Sigma \text{Seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	
		Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	$\frac{\Sigma \text{Rumah tangga bersanitasi}}{\Sigma \text{Seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	

2	Meningkatnya kualitas jaringan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap yang merata di semua wilayah	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	$\frac{\Sigma \text{ Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\Sigma \text{ Seluruh panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	
		Persentase Jembatan Kondisi Baik	$\frac{\Sigma \text{ Jembatan kondisi baik Kabupaten/Kota}}{\Sigma \text{ Seluruh jembatan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	
		Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\Sigma \text{ Panjang drainase jalan kabupaten kondisi baik}}{\Sigma \text{ Seluruh panjang drainase jalan kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	
		Persentase jalan prioritas yang sudah dilengkapi PJU	$\frac{\Sigma \text{ Panjang jalan prioritas yang sudah dilengkapi PJU}}{\Sigma \text{ Seluruh panjang jalan prioritas Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang PJU, Peralatan dan Laboratorium	
3	Meningkatnya sistem jaringan irigasi dan pemanfaatannya	Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Hujan (MH)	$\frac{\Sigma \text{ Luas Realisasi Tanam Musim Hujan (MH)}}{\Sigma \text{ Total Luas Baku Sawah}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air	
		Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau I (MK.I)	$\frac{\Sigma \text{ Luas Realisasi Tanam Musim Hujan (MK.I)}}{\Sigma \text{ Total Luas Baku Sawah}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air	
		Persentase luasan baku sawah yang tercukupi air irigasi Musim Kemarau II (MK.II)	$\frac{\Sigma \text{ Luas Realisasi Tanam Musim Hujan (MK.II)}}{\Sigma \text{ Total Luas Baku Sawah}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air	
4	Meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan zonase RTRW	Persentase kawasan yang sesuai peruntukannya	$\frac{\Sigma \text{ Luas kawasan sesuai IPTR}}{\Sigma \text{ Luas kawasan sesuai IPTR}} \times 100\%$	Bidang Penataan Ruang	

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

- Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera
- Misi : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (sehat, Maju, Agamis, Ramah, terampil)
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAGETAN

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Prosentase Jumlah Rumah Layah Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah penduduk}} \times 100$	Bidang Perumahan	Dinas PERKIM
2	Menurunnya Kawasan Kumuh yang berada di Kabupaten Magetan	Prosentase Luas Kawasan Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Permukiman Kumuh yang tertangani}}{\text{Luas Permukiman Kumuh}} \times 100$	Bidang Kawasan Permukiman	Dinas PERKIM
3	Meningkatnya Jumlah Luasan RTH di Kabupaten Magetan	Prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Kawasan perkotaan}} \times 100$	PSU	Dinas PERKIM

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. MAGETAN**

a. Tugas

Tugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:

1. Menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati
2. Memelihara dan menyelenggarakan ketraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran

b. Fungsi

Fungsi Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteranan masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI), PPNS dan/atau aparaturnya
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundangan daerah lainnya
- h. Pelaksanaan pembinaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- j. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya dibidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2019

NO	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase penertiban pelanggaran Perda/Perkada	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda yang ditertibkan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun berjalan}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan
		Presentase laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah laporan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketentraman lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan
2.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menanggulangi kebakaran	Presentase laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit	$\frac{\text{Jumlah laporan peristiwa kebakaran yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 15 menit}}{\text{Jumlah laporan yang diterima}} \times 100\%$	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan	Satpol PP dan Damkar Kab. Magetan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN**

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KET.
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 	
		2. Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah anak terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 	
		3. Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah Lanjut Usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah Lanjut Usia terlantar di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial 	

		4. Persentase (%) tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	$\frac{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di seluruh Wilayah Kabupaten Magetan}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	
		5. Persentase (%) cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten yang memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat}} \times 100$	- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial - Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- 1 Instansi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGETAN
- 2 Tujuan :
 - 1 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
 - 2 Meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesetaraan gender dalam pembangunan serta perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak;
- 3 Sasaran :
 - 1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
 - 2 Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)
 - 3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
 - 4 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
- 4 Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dan Tugas Pembantuan.
- 5 Fungsi :
 - 1 Perumusan Kebijakan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
 - 2 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - 3 Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - 4 Pelaksanaan Administrasi Dinas Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; Dan
 - 5 Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	<p>TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. Rumus TFR adalah sebagai berikut:</p> $TFR = 5 \times \sum_{i=1}^7 [ASFR]_i$ <p>ASFR_i = banyaknya bayi menurut kelompok umur wanita Ke i</p>	BPS	BIDANG KB DAN ADVOKASI
2. Meningkatnya pendewasaan usia perkawinan (PUP)	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	<p>Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.</p> $\text{Rata-rata UKP Perempuan} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ <p>U_i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama</p>	LAPORAN UKP	BIDANG KB DAN ADVOKASI

<p>3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</p>	<p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p>	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan - Dinas PPKB dan PPPA Kab. 	<p>BIDANG PPPA</p>
<p>4. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</p>	<p>Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga</p> <p>Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga</p>	<p>LAPORAN KDRT</p>	<p>BIDANG PPPA</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019

INSTANSI : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAGETAN

VISI : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Maju dan Lebih Sejahtera

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta memberdayakan desa sebagai basis sekaigus ujung tombak pembangunan daerah

TUGAS : Membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

FUNGSI :

- 1) Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya indeks status desa	Jumlah desa yang meningkat indeks statusnya	Jumlah desa yang mengalami peningkatan indeks status berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan • Kabid. Pemberdayaan Pemerintahan Desa • Kabid. Pemberdayaan Pembangunan Desa 	Bidang Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- Visi : Masyarakat Magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera
- Misi : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berkualitas lingkungan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN (KINERJA UTAMA)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJM	Sasaran Renstra				
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	% pemenuhan baku mutu kualitas air	(Jumlah sample dengan BOD dan COD yang melebihi baku mutu air / jumlah sample yang diuji) x 100 %	Laporan pemantauan kualitas air badan air	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
			% pemenuhan baku mutu kualitas udara	(Jumlah sample dengan SO2 dan NO2 sesuai baku mutu udara / jumlah sample yang ada) x 100%	Laporan pemantauan kualitas udara ambien	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
			% tutupan vegetasi / lahan	(Jumlah lahan yang tertanami / Jumlah lahan yang harus ditanami) x 100 %	Laporan pengelolaan tutupan vegetasi	Bidang Tata Lingkungan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	% penanganan sampah	(Persentase volume sampah yang ditangani per hari = (Volume Sampah yang ditangani TPST dan diangkut ke TPA / Volume Timbulan Sampah) x 100 %	Laporan TPST	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
			% pengurangan sampah dari sumbernya	(Volume sampah yang berkurang dari sumbernya / Volume sampah pada sumbernya x 100 %)	Laporan pengurangan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN**

VISI : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)

MISI : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan di Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang data dan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang data dan dokumen kependudukan dan pencatatan pendaftaran penduduk, bidang pencatatan sipil dan bidang pengendalian penduduk
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaantugas Dinas
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi Administrasi Kependudukan
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
6. Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan
7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang kependudukan
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan
10. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan di lingkungan pemerintah daerah
11. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan
12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
13. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan
14. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan
15. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada data base kependudukan
16. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan
17. Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Persentase penduduk Ber-KTP-el	Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk wajib KTP > 17 dan atau pernah/sudah menikah	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Persentase penduduk usia (0-18 Tahun) berakta kelahiran	Jumlah penduduk berakta kelahiran dibagi Jumlah penduduk	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	Jumlah cetak KIA dibagi Jumlah anak uasi 0 - < 17 Tahun	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGETAN**

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	Bidang Ketertiban Lalu Lintas	
		Jumlah pelanggaran lalu lintas	Jumlah kendaraan yang ditilang	Bidang Ketertiban Lalu Lintas	
2	Meningkatnya kualitas transportasi publik dan barang	Persentase angkutan publik dan barang yang laik jalan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang diuji}}{\text{Jumlah kendaraan yang wajib uji}} \times 100 \%$	Bidang Angkutan dan keselamatan Transportasi	
3	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana kelengkapan jalan kondisi baik}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi	

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- VISI** : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
MISI : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
Tugas : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64). Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian. dan bidang statistik.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik	Persentase OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik	$\frac{\text{Jumlah OPD, kelurahan dan desa yang menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik}}{\text{Jumlah seluruh OPD, kelurahan dan desa}} \times 100\%$	Diskominfo
2.	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	$\frac{\text{Jumlah media komunikasi dan informasi publik yang dipantau dan dikelola}}{\text{Jumlah media informasi}} \times 100\%$	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

3.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik daerah	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyediakan data statistik sektoral}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Bidang Tatakelola Komunikasi dan Informasi
4.	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks kematangan keamanan informasi	Pengukuran indeks keamanan informasi	Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan

Visi : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera

Misi : Ke 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Basis Sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Daerah

Tujuan : Meningkatnya Kemampuan/Keberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.

Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dan, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Yang Baru tahun n}}{\text{Jumlah Total Usaha Mikro tahun n-1}} \times 100\%$	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN
- VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA
- MISI : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
- TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dibidang perindustrian dan perdagangan.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO.	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1. Persentase pertumbuhan usaha perdagangan	$\frac{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n - \text{Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah Usaha Perdagangan Tahun } n-1} \times 100\%$	Laporan program dan BPS	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
2	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	2. Persentase pertumbuhan industri kecil	$\frac{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n - \text{Tahun}(n-1)}{\text{Jumlah Total Industri Tahun } n-1} \times 100\%$	Laporan program dan BPS	Bidang Industri

**INDIKATOR KINERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN**

- VISI** : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI** : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
- TUGAS** : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- FUNGSI** :
- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahandi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja}} \times 100\%$	- Seksi penempatan dan perluasan kesempatan kerja
2.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah KK yang ditempatkan	Jumlah KK yang ditempatkan	- Seksi Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Nilai Realisasi Investasi	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
		b. Jumlah investor.	Jumlah Investor	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai SKM	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
		b. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat.	$\frac{(\text{Pengaduan } n-1) - (\text{Pengaduan } n)}{\text{Pengaduan } n-1} \times 100\%$	Laporan Pengaduan	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN MAGETAN**

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Indeks Minat Baca	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka}}{\text{Jumlah Usia Baca (5-55 th)}} \times 100$	Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan	Dinas Arpus
2	Meningkatnya Prosentase perangkat daerah yang mengelola Arsip sesuai tata kelola kearsipan	Perangkat daerah yang mengelola Arsip sesuai Tata Kelola Kearsipan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip sesuai Tata Kelola Kearsipan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100$	Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	Dinas Arpus

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
- Visi : Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- Misi : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
- Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah
- Fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. penataan prasarana bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - g. pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman,;
 - h. pengawasan peredaran sarana bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - i. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - k. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - l. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - m. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - n. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - o. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
 - p. pelaksanaan administrasi Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN
Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan	1. Persentase ketersediaan Energi	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan energi/kap}}{\text{Jumlah ketersediaan Energi yang dianjurkan}} \times 100\%$
	2. Persentase ketersediaan Protein	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan protein/kap}}{\text{Jumlah ketersediaan Protein yang dianjurkan}} \times 100\%$
Terpenuhinya Konsumsi Energi dan Protein	1. Persentase Konsumsi Energi	$\frac{\text{Jumlah konsumsi energi/kap}}{\text{Jumlah konsumsi Energi yang dianjurkan}} \times 100\%$
	2. Persentase Konsumsi Protein	$\frac{\text{Jumlah konsumsi protein/kap}}{\text{Jumlah konsumsi Protein yang dianjurkan}} \times 100\%$
Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Produksi Padi	Luas Panen Padi x Produktivitas padi
	2. Produksi Jagung	Luas Panen Jagung x Produktivitas jagung
	3. Produksi Pamelon	jumlah produksi pamelon per pohon x luas panen
	4. Produksi Tebu	Luas Panen Tebu x Produktivitas tebu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

TUGAS : Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan dan perikanan

FUNGSI : Perumus, pelaksana kebijakan, pelaksanaan evaluasi pelaporan dan pelaksana administrasi di bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan Serta pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya SDM Peternak dan Pembudidaya ikan	Persentase pelaku usaha peternakan dan perikanan	$\frac{\text{Pelaku usaha peternakan dan perikanan Tahun (t) - Tahun (t-1)}}{\text{pelaku usaha peternakan dan perikanan Tahun (t-1)}} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
2	Meningkatkan Hasil Produksi Peternakan dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Daging, Telur, Susu dan Ikan	$\frac{\text{Produksi Daging Tahun (t) - Tahun (t-1)}}{\text{Produksi Daging Tahun (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Produksi Telur Tahun (t) - Tahun (t-1)}}{\text{Produksi Telur Tahun (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Produksi Susu Tahun (t) - Tahun (t-1)}}{\text{Produksi Susu Tahun (t-1)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Produksi Ikan Tahun (t) - Tahun (t-1)}}{\text{Produksi Ikan Tahun (t-1)}} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
 Visi : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin MANTAB dan Lebih Sejahtera
 Misi : Mengembangkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan Manajemen Pemerintahan yang bersih, profesional dan adil
 Tugas : Melaksanakan, menyiapkan bahan urusan tata usaha Pimpinan dan Umum, Perlengkapan, Pengelolaan keuangan daerah serta bimbingan rumah tangga
 Fungsi :
 1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat masuk dan pendistribusian surat dari Pimpinan
 2. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan pemeliharaan jaringan serta alat komunikasi dan pemeliharaan jaringan serta alat komunikasi di lingkup Sekretariat Daerah
 3. Pelaksanaan penyiapan tempat, perlengkapan, akomodasi dan konsumsi untuk kegiatan rapat, acara kenegaraan , jamuan tamu, upacara hari besar nasional, hari besar Islam dan lainnya
 4. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan gedung kantor Kantor Sekretariat Daerah , Rumah Dinas serta rumah jabatan
 5. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Pimpinan dan lingkup Sekretariat Daerah
 6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Setda
 7. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
 8. Penyiapan pengelolaan keuangan Daerah
 9. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga dan Keuangan
 - 10 Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya fasilitas kegiatan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan Pemerintah Daerah yang harus difasilitasi}} \times 100\%$	Bagian Umum Setdakab Magetan	Bagian Umum Setdakab Magetan
Tercukupinya sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang ada}} \times 100\%$	Bagian Umum Setdakab Magetan	Bagian Umum Setdakab Magetan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN**

- VISI** : Masyarakat Magetan yang SMART semakin mantab dan lebih sejahtera.
MISI : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
TUGAS : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya dibidang layanan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Daerah.
FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
 - b. Penyelenggaraan fasilitas pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan.
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyampaian informasi pengadaan barang/jasa.
 - d. Penyelenggaraan bimbingan teknis, memberikan pendapat, rekomendasi dan tindakan koreksi terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	KET.
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2	3	4	5
1	Persentase proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering yang diselesaikan	Persentase proses pengadaan barang/jasa melalui e-tendering yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah permohonan paket pelelangan yang selesai}}{\text{Jumlah total paket yang masuk}} \times 100$	Kasubag manajemen pengadaan barang/jasa

INDIKATOR KINERJA
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MAGETAN

- VISI** : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI** : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
- TUGAS** : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, administrasi pelayanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengembangan budaya kerja, Standar Manajemen Mutu (SMM), Standar Pelayanan Minimall (SPM) dan Reformasi Birokrasi.
- FUNGSI** :
- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, , pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	Rata-rata Nilai IKM	Nilai IKM	Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik	<u>Jml. OPD yang memiliki Inovasi Yanblik</u> X 100% Jumlah OPD	Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Ketatalaksanaan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memiliki proses bisnis dan SOP	<u>Jml. OPD yg sdh menyusun Probis dan SOP</u> X100% Jumlah OPD	Kasubag.Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
3	Kesesuaian kelembagaan dengan Anjab ABK	Persentase Perangkat Daerah yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	<u>Jml. OPD yg kelembagaannyasesuai peraturan</u> X100% Jumlah OPD	Kasubag.Kelembagaan dan Anjab
		Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan anjab ABK	<u>Jml. OPD yang sesuai Anjab dan ABK</u> X100% Jumlah OPD	Kasubag.Kelembagaan dan Anjab

4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja Persentase KBK Aktif	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja $\frac{\text{Jml. OPD yang memiliki KBK}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Kasubag. Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Kasubag. Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian
		Nilai RB bidang - Ketatalaksanaan - Penataan dan penguatan organisasi - Pelayanan Publik - Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB bidang - Nilai Ketatalaksanaan - Nilai Penataan dan penguatan organisasi - Nilai Pelayanan Publik - Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB bidang - Kasubag. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik - Kasubag. Kelembagaan dan Anjab - Kasubag. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik - Kasubag. Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDAKAB. MAGETAN

- INSTANSI : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- VISI : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
- MISI : Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah;
- TUGAS : Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, perumusan pedoman dan dan menyusun bahan koordinasi di bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal, investasi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- FUNGSI :
- a. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang BUMD, perbankan, penyertaan modal dan investasi.
 - b. Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.
 - c. Penyiapan dan Pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk tehnis pembinaan Penyusunan dan pengolahan bahan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan monitoring evaluasi bidang pariwisata, industri, perdagangan, jasa, koperasi dan UKM dan pengendalian inflasi daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas pengendalian inflasi daerah	Presentase kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dikoordinasikan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pengendalian inflasi daerah yang harus dilaksanakan}} \times 100\%$	Data Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Perekonomian Setda
2. Meningkatnya kualitas pembinaan BUMD	Presentase kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan BUMD yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan BUMD yang harus dilaksanakan}} \times 100\%$	Data Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Perekonomian Setda
3. Meningkatnya kualitas pengembangan usaha mikro	Presentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang mendapat akses permodalan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang mengajukan}} \times 100\%$	Data Laporan Kegiatan	Bagian Administrasi Perekonomian Setda

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM

- INSTANSI : Bagian Hukum Sekreariat Daerah Kabupaten Magetan
- VISI : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera .
- MISI : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
- TUGAS : Penyiapan bahan dan koordinasi perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum/kerjasama daerah/HAM dan telaahan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi/informasi hukum dan penyuluhan hukum, serta perencanaan, monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- FUNGSI :
- a. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi, harmonisasi, pembahasan, evaluasi dan/atau fasilitasi rancangan produk hukum daerah, penyusunan naskah kerjasama daerah, penyelesaian sengketa hukum pemerintah daerah, serta pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan perancangan produk hukum daerah;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka konsultasi dengan instansi lain atau dengan Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat terkait produk hukum, bantuan hukum dan HAM;
 - c. pelaksanaan kegiatan dokumentasi / informasi, pengkajian dan penyuluhan produk hukum;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pendistribusian produk hukum daerah;
 - f. penyiapan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris dan kegiatan administrasi umum;
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan HAM, administrasi penyuluhan hukum , dokumentasi/pengkajian produk hukum dan penilaian kinerja bawahan; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pelayanan produk hukum yang ditindaklanjuti dan produk hukum yang di sosialisasikan	Persentase usulan rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah usulan rancangan produk hukum yang masuk}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang diproses}} \times 100\%$	Data kegiatan	Bagian Hukum Setdakab
	Persentase produk hukum daerah yang di sosialisasikan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang ada}}{\text{Jumlah produk hukum yang di sosialisasikan}} \times 100\%$	Data kegiatan	Bagian Hukum Setdakab

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- Visi : Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantap dan lebih Sejahtera
- Misi : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintah yang bersih, professional dan adil
- Tugas : Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraanPembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penerangan baik ke dalam maupun keluar guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten, pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kegiatan protokoler Bupati dan / atau Wakil Bupati.
- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol meliputi pemberitaan, pendokumentasian, dan keprotokolan;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta kegiatan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dan protokol;
 - c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media massa;
 - d. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Kabupaten;
 - e. Pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan kegiatan protokoler Bupati atau Wakil Bupati;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Derah.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kehumasan dan keprotokolan pimpinan daerah yang lebih profesional	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan	Jumlah kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi pelayanan kehumasan dan keprotokolan dibagi jumlah total kegiatan pimpinan daerah se-tahun x 100%	Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan	Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
2. Visi : Masyarakat Magetan yang smart semakin mantab dan lebih sejahtera.
3. Misi : Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang smart (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
4. Tugas : Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan.
5. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidangkeagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Terwujudnya koordinasi yang mantab dalam pembangunan masyarakat.	Presentase kegiatan pembangunan masyarakat yang dikoordinasikan	Jumlah kegiatan pembangunan masyarakat yang dikoordinasikan dibagi Jumlah kegiatan yang harus dikoordinasikan kali 100%	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Nama Unit Organisasi	: Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Visi	: Terwujudnya Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
Misi	: Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Tugas	: Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi sumber daya alam, lingkungan hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1) Penyiapan penyusunan perumusan kebijakan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ;4) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi secara terpadu di bidang administrasi sumber daya alam, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya koordinasi pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan ESDM	Persentase kegiatan pengelolaan SDA yang dikoordinasikan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan.	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan pengelolaan ESDM yang dikoordinasikan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan Data Kegiatan	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

Visi : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Efektif dan Efisien.

Misi : Terciptanya profesionalisme perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat menuju pemerintahan yang baik (good governance).

Tugas Bagian Pemerintahan :

Melaksanakan penyiapan perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta urusan ketertiban dan keamanan

Fungsi :

1. Perumusan program kerja di bidang Kerja Sama, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
2. Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
3. Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga atau instansi lain dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kerjasama, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
4. Pelaksanaan Pembinaan administrasi dan aparatur bidang kerja sama, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kerja sama, Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase OPD yang melaporkan LPPD tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD setor data IKK Tepat Waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan
		Prosentase kecamatan dengan tingkat kematangan sedang	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan tingkat kematangan sedang}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \%$	Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan
		Prosentase Desa dan Kelurahan terspasial	$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan terspasial}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100 \%$	Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tugas : Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, dan menyiapkan bahan koordinasi bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan.

Fungsi : 1. Perumusan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
2. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
3. Pengawasan dan pemantauan di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
6. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	KET.
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan daerah	Persentase regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun	$\frac{\text{Jumlah regulasi tentang pelaksanaan APBD yang disusun}}{\text{Jumlah regulasi tentang pelaksanaan APBD yang ditargetkan}} \times 100\%$	
		Persentase OPD yang membuat laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 – 2023
KECAMATAN BENDO**

- Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA
Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Skor IKM	Skor IKM	Hasil survei melalui questioner	SKPD Kecamatan Bendo
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan	Persentase jumlah desa / kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah desa dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Bendo	SKPD Kecamatan Bendo

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN KARANGREJO
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Karangrejo
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal } 80 \times 100}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}$	Data Kecamatan Karangrejo	Kecamatan Karangrejo

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN KARAS
 Visi : “MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Skor IKM	<u>Skor IKM</u>	Hasil survey melalui questioner	Kec. Karas
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	<u>Jumlah desa/kel. dengan nilai monev minimal 80 x 100</u> jumlah desa/kel	Data Kecamatan Karas	Kec. Karas

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN KARTOHARJO
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Kartoharjo
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN KAWEDANAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Kawedanan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Kawedanan	Kecamatan Kawedanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN LEMBEBYAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Lembeyan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Lembeyan	Kecamatan Lembeyan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN MAGETAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegasan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Skor IKM	Skor IKM	Hasil survey melalui questioner	SKPD Kecamatan Magetan
2	Terwujudnya tata kelola keuangan, aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase desa/kelurahan dengan nilai Citra Pelayanan Prima (CPP) > 80 point	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai CPP} > 80}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Magetan	SKPD Kecamatan Magetan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN NGARIBOYO
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Ngariboyo
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	<u>Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80</u> x 100 Jumlah Desa/Kelurahan	Data Kecamatan Ngariboyo	Kecamatan Ngariboyo

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN NGUNTORONADI
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Nguntoronadi
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	<u>Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80</u> x 100 Jumlah Desa/Kelurahan	Data Kecamatan Nguntoronadi	Kecamatan Nguntoronadi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN PANEKAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Panekan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Panekan	Kecamatan Panekan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN PARANG
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Parang
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Parang	Kecamatan Parang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN PLAOSAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Plaosan
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	<u>Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80</u> x 100 Jumlah Desa/Kelurahan	Data Kecamatan Palosan	Kecamatan Plaosan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN PONCOL
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Poncol
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Poncol	Kecamatan Poncol

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN SUKOMORO
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegakan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Sukomoro
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Sukomoro	Kecamatan Sukomoro

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN TAKERAN
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA”
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Takeran
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	<u>Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80</u> x 100 Jumlah Desa/Kelurahan	Data Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN SIDOREJO
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Sidorejo
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Sidorejo	Kecamatan Sidorejo

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN MAOSPATI
 Visi : ‘ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA’
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Maospati
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Maospati	Kecamatan Maospati

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Instansi : KECAMATAN BARAT
 Visi : ' MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA"
 Misi : Mengembangkan Penyelenggaraan tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Adil
 Tugas : Melakukan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan Dalam Wilayah Kecamatan
 Fungsi : Sebagai koordinator penyelenggaraan pembinaan, penerapan, penegaan perundang-undangan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pelayanan administrasi surat menyurat secara umum kepada masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	- Skor IKM	Skor IKM	Hasil Survey melalui Kuesioner	Kecamatan Barat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/ Kelurahan dengan nilai monev minimal 80	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel dengan nilai monev minimal 80}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$	Data Kecamatan Barat	Kecamatan Barat

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 TTD
JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.
 Pembina
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO